



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR : W22.U/ 2018 /KP.02.1/SK/7/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUJI KELAYAKAN
CALON PEJABAT KEPANITERAAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Membaca** : Surat Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22.U/23/KP.02.1/RHS/4/2018 tanggal 17 April 2018.
- Menimbang** :
1. Bahwa sehubungan dengan usulan jabatan Kepaniteraan dari beberapa satuan kerja wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dipandang perlu untuk mengusul calon pejabat untuk di angkat dalam jabatan tersebut.;
 2. Bahwa agar pengusulan calon pejabat dalam jabatan sebagaimana angka satu di atas terpenuhi, di pandang perlu untuk menguji kelayakan calon pejabat yang di usulkan.;
 3. Bahwa uji kelayakan calon pejabat sebagaimana angka tiga di atas, menjadi bahan pertimbangan Tim Baperjakat Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar.;
 4. Bahwa guna uji kelayakan calon Pejabat dalam jabatan sebagaimana maksud angka dua dan tiga di atas lebih objektif, dipandang perlu untuk membentuk tim penguji kelayakan calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar.;
 5. Bahwa Hakim dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini, di pandang cakap untuk ditugaskan sebagai tim Penguji sebagaimana tersebut pada angka lima di atas.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017.;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi Dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Badan Peradilan Umum.;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Baperjakat pada tanggal 11 April 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menugaskan Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dalam lampiran kesatu surat keputusan ini sebagai penguji calon pejabat Kepaniteraan wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar.;
- Kedua** : Calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang di uji, sebagaimana dalam lampiran kedua surat keputusan.;

Ketiga : .../

